
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA WRINGIN ANOM KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

Nina Sa'idah Fitriyah¹, Zainur Romla²

¹Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

²Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo
Email: ninasaidahfitriyah84@gmail.com

ABSTRAK

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo ini dilatarbelakangi oleh kemiskinan yang telah lama dihadapi hampir semua negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang diatur oleh perundang-undangan pada Kementerian Sosial yaitu Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dari informan untuk mengetahui bagaimana penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hasil analisis kualitatif dengan metode wawancara, dapat disimpulkan bahwa : 1) Segi kebijakan, program BPNT di Desa Wringin Anom sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial, namun tidak dengan perangkat desa yang hanya mengusulkan masyarakatnya yang tidak mampu agar mendapatkan bantuan pangan tersebut. 2) Segi pelaksana, Pendamping hingga Koordinator Daerah sudah melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan penyaluran program BPNT dari Bank penyalur kemudian kepada e-warung. Setelah itu, bantuan disalurkan kepada masyarakat. 3) Segi target, pencapaian belum sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Meskipun begitu, sebagian orang yang mendapatkan bantuan merasakan bahwa dengan adanya program BPNT mereka dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangannya. 4) Segi lingkungan, masyarakat harus dapat menciptakan suasana yang rukun dan damai agar tercipta lingkungan dengan tingkat sosialisasi tinggi dan tidak lagi ada kecanggungan antara suatu organisasi dengan masyarakat. 5) Segi proses, masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam penyaluran BPNT dapat merasakan hasil dari adanya program ini. Selain itu, prosedur penyaluran sudah sesuai dengan aturan.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai

ABSTRAC

The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Wringin Anom Village, Panarukan Subdistrict, Situbondo Regency is motivated by poverty that has long been faced by almost all developing countries, especially countries with dense population such as Indonesia.

This study aims to describe how the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Wringin Anom Village, Panarukan District, Situbondo Regency is regulated by legislation at the Ministry of Social Affairs, namely the Regulation of the Director General of Handling the Poor Number 05/4/PER/HK.02.01 /11/2019 concerning Technical Guidelines for the Distribution of Non-Cash Food Aid.

Research with a qualitative approach was used by researchers to obtain data from informants to find out how the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Wringin Anom Village, Panarukan District, Situbondo Regency.

Based on the results of qualitative analysis using the interview method, it can be concluded that: 1) In terms of policy, the BPNT program in Wringin Anom Village is in accordance with the policies issued by the central government, namely the Ministry of Social Affairs, but not with village officials who only propose people who cannot afford to get assistance the food. 2) In terms of implementers, assistants to regional coordinators have carried out their duties as a service for distributing the BPNT program from the channeling bank to e-warung. After that, the aid is distributed to the community. 3) In terms of targets, the achievement is not in accordance with the environmental conditions of the people who are less able to meet their daily food needs. Even so, some people who received assistance felt that the existence of the BPNT program could help them in meeting their food needs. 4) In terms of the environment, the community must be able to create a harmonious and peaceful atmosphere in order to create an environment with a high level of socialization and there is no longer any awkwardness between an organization and the community. 5) In terms of the process, the community and parties involved in the distribution of BPNT can feel the results of this program. In addition, the distribution procedure is in accordance with the regulations.

Keywords: Implementation, Non-Cash Food Assistance

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah lama yang pada umumnya dihadapi di hampir semua Negara-negara berkembang, terutama Negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga Negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Indonesia memiliki masyarakat yang beranekaragaman suku, kebiasaan, adat, kehidupan dan agama. Kehidupan masyarakat Indonesia sebagai Negara berkembang dapat dikatakan masih menegah kebawah yang tergolong sebagai masyarakat miskin.

Dengan demikian, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah mengembangkan beberapa program yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Presiden sangat mengapresiasi Program BPNT, Karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan. Program BPNT merupakan Program pengganti dari Program Beras Sejahtera (RASTRA), Pemerintah mulai melakukan perubahan terkait program RASTRA menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikarenakan menimbulkan permasalahan terkait tepat jumlah yang masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per bulan dari yang 4 seharusnya sebanyak 15 kg per bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya yaitu Rp. 9.000,- per kg. Maka dari itu, Pemerintah mengubah nama RASTRA menjadi salah satu program yang sedang dilakukan pada saat ini yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tata cara atau peraturan petunjuk teknis dan mekanisme dalam penyaluran bantuan pangan non tunai tersebut juga diatur dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kementerian Sosial memastikan program bantuan pangan non tunai akan terus berlanjut di tahun 2021 saat ini meskipun terdapat pengurangan jumlah penerima. Tujuan program BPNT sebenarnya untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Program bantuan pangan non tunai ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Pada tahun 2019, jumlah besaran uang yang terisi secara otomatis dari bank penyalur pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu sebesar Rp. 110.000,- yang diberikan kepada masing-masing masyarakat penerima manfaat. Selanjutnya pada tahun 2020 hingga sekarang bantuan pangan non tunai disalurkan oleh pemerintah dengan anggaran yang mencapai Rp. 45. 12 triliun, Bantuan Pangan Non Tunai ini akan ditargetkan dan diterima oleh 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan kepada masing-masing Per KPM sebanyak Rp. 200.000,- per bulan. Setelah itu, masyarakat kurang mampu penerima manfaat BPNT akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dipergunakan untuk membeli sembako di *e-warung*. Berikut jenis-jenis bahan sembako yang diperoleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari agen penyalur bahan pangan yaitu terdiri dari beras, sayuran, bahan nabati maupun hewani, kacang, telur , buah-buahan yang sesuai dengan permintaan dari per KPM tersebut.

Bantuan Pangan Non-Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau *e-warung* yang bekerjasama dengan bank. Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara. Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan Program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Dari penjelasan diatas, Situbondo termasuk kabupaten yang melaksanakan program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT). Situbondo juga tergolong kedalam masyarakat yang berpenghasilan rendah yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari mereka. Kabupaten Situbondo yang terletak di provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 17 Kecamatan, 132 Desa, dan 4 Kelurahan. Kecamatan Panarukan adalah Salah satu kecamatan di Kabupaten Situbondo yang melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kecamatan Panarukan terdiri dari 8 Desa dan 6 Kelurahan. Desa Wringin Anom merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan pangan non tunai. Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Wringin Anom mulai dilaksanakan sejak tahun 2019. Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Wringin Anom sudah mulai berjalan sejak 2 tahun lalu. Dari hasil data masyarakat miskin tersebut dapat diuraikan bahwa di Dusun Kom tercatat masyarakat miskin sebanyak 100 orang, Dusun Sabrang sebanyak 175 orang, Dusun Blikeran sebanyak 188, Dusun Barat Kebun sebanyak 150 orang, Dusun Krajan sebanyak 130 orang dan Dusun Wringin Anom Timur sebanyak 106 orang. Jadi jika dijumlahkan dalam satu Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo ada 849 orang yang tercatat sebagai masyarakat miskin atau rata-rata sebesar 142 orang. Masalah ketidaktepatan sasaran dalam memberikan bantuan pangan non tunai dikarenakan kurangnya validasi dan verifikasi data dari pusat yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sehingga menimbulkan komplain masyarakat yang tidak menerima bantuan apapun terhadap masyarakat yang menerima bantuan pangan non tunai karena program bantuan pemerintah ini dijalankan dari Tahun 2019 sampai sekarang yang salah satu masyarakat di Desa Wringin tersebut tidak pernah mendapatkan bantuan pangan non tunai sama sekali seperti nenek Saniti. Apalagi dengan masyarakat yang menerima bantuan double atau rangkap. Missal sudah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ditambah dengan bantuan pangan non tunai jadinya masyarakat yang tidak menerima bantuan apapun tersebut merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Walaupun salah satu masyarakat tersebut termasuk dalam kriteria yang berhak menjadi penerima bantuan pangan non tunai (BPNT).

Peraturan kementerian sosial yang tercantum diatas, masyarakat yang kurang mampu ataupun sama sekali tidak mendapatkan bantuan pangan non

tunai dapat diajukan kepada pemerintah pusat dengan mengadakan musyawarah desa. Setelah dimusyawarahkan hasil musyawarah tersebut dirundingkan dengan masyarakat pusat dengan mengirim nama-nama masyarakat yang tidak mampu sehingga layak untuk menerima bantuan pangan non tunai. Berdasarkan observasi awal dari penjelasan di atas, menimbulkan fenomena terkait pelaksanaan program BPNT di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo kurang tepat sasaran yang disebabkan kurangnya pengoptimalan verifikasi dan validasi data KPM yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga peneliti tertarik untuk lebih lanjut meneliti mengenai "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Dimana pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap informen dalam melakukan penelitian di lapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian implementasi bantuan pangan non tunai (bpnt) di desa wringin anom kecamatan panarukan kabupaten situbondo adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Ada dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah sumber data diperoleh langsung oleh peneliti.
2. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain.

Informen dalam penelitian ini adalah yang dianggap dapat memberikan informasi (key-information) yang dibutuhkan dilokasi penelitian yaitu :

1. Informan Kunci
2. Informan Utama
3. Informan Pendukung

Pengambilan data di lapangan menggunakan pedoman wawancara, alat rekam dan alat dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan dan pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1) Observasi, 2) Dokumentasi, 3) Wawancara

Keabsahan Data menurut Sugiyono (2006:273-274), menjelaskan ada tiga macam triangulasi. Ketiga triangulasi tersebut yaitu : 1) Triangulasi sumber, 2) Triangulasi teknik , 3) Triangulasi waktu

Teknik Analisis Data menggunakan langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan hasil deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai dengan didasarkan data yang diperoleh dari informan yang paham akan Program BPNT. Penelitian ini digunakan dengan wawancara dan dokumentasi. Penggunaan metode wawancara diharapkan dapat membantu peneliti dalam mendapatkan data yang dibutuhkan.

Sebelum dilakukan penelitian, penulis melakukan uji materi terlebih dahulu dari beberapa literature. Kemudian membuat beberapa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada beberapa narasumber yang akan ditetapkan menjadi informan. Hasil wawancara kemudian dilaporkan dalam bentuk ringkasan singkat dari beberapa informan tersebut.

1. Tepat Kebijakan

a. Terkait Perumusan

Dapat disimpulkan bahwa perumusan dalam kebijakan mengenai Program BPNT dibuat oleh Peraturan Presiden dan diwewenangkan kembali kepada Kementerian Sosial.

b. Terkait Pemecahan Masalah

Dapat disimpulkan bahwa program BPNT dapat dikatakan bisa memecahkan masalah karena dapat membantu mengurangi kebutuhan pangan.

c. Lembaga yang Mempunyai Wewenang

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial hanya penampung atau kantor yang mempunyai data seperti Data Kemiskinan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

2. Tepat Pelaksana

a. Terkait Pemerintah

Dapat disimpulkan bahwa ada kerjasama antar Pemerintah dengan masyarakat yang dapat memperlancar jalannya pelaksanaan program BPNT.

b. Terkait Kerjasama Antar Pemerintah dengan Masyarakat

Dapat disimpulkan bahwa program BPNT merupakan Program Pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat dan diharapkan dapat mengurangi

kebutuhan pangan.

c. **Terkait Kebijakan yang di Swastakan**

Dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran Program BPNT meliputi Perangkat Desa, Pendamping Program BPNT, Koordinator Daerah, *e-warung* serta Bank Penyalur.

3. Tepat Target

a. **Terkait Kebijakan Bersifat Baru atau Diperbaharui**

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan dalam program BPNT adalah program pengganti dari RASTRA yang sampai sekarang masih belum tepat sarasannya dikarenakan penyesuaian dengan alokasi dana yang dikeluarkan dari keuangan Negara kepada masyarakat yang belum mencakup keseluruhan masyarakat tidak mampu.

4. Tepat Lingkungan

a. **Terkait Lingkungan Kebijakan**

Dari uraian diatas, terdapat beberapa penanggung jawab dalam Program BPNT ini seperti Perangkat Desa, Pendamping Koordinator, Satgas Gabungan Penanganan Pangan serta Penyalur pangan dan Sembako.

b. **Terkait Interaksi Antar Lembaga dengan Masyarakat**

Dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran Program BPNT sudah dilakukan sosialisasi terkait penukaran Kartu Elektronik atau disebut juga (KKS) Kartu Keluarga Sejahtera dengan bahan sembako di *e-warung*.

c. **Terkait Interpretasi dari Lembaga**

d. **Dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak pihak yang terlibat dalam penyaluran BPNT agar berjalan seefektif mungkin.**

5. Tepat Proses

a. *Policy Acceptance* (Publik Memahami Dampak dari Program di Masa Depan)

Dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya Program BPNT dapat meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat mengenai bahan pangan dan bahan sembako agar memenuhi kebutuhan gizinya.

b. *Strategic Readiness* (Publik Siap Melaksanakan Kebijakan)

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran program BPNT sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi kebijakan, program BPNT di Desa Wringin Anom sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu kementerian sosial tidak dengan perangkat desa yang hanya mengusulkan masyarakatnya yang tidak mampu agar mendapatkan bantuan pangan tersebut.
2. Dari segi pelaksana, dari Pendamping hingga Koordinator Daerah sudah melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan penyaluran program BPNT dari Bank penyalur kemudian kepada *e-warung* setelah itu disalurkan kepada masyarakat.
3. Dari segi target, dalam hal ini pencapaian target belum sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan

pangannya sehari-hari. Meskipun sebagian orang yang mendapatkan bantuan tersebut merasakan adanya program BPNT dapat membantu memenuhi kebutuhan pangannya.

4. Dari segi lingkungan, dalam lingkungan harus menciptakan suasana yang rukun dan damai agar tercipta lingkungan yang bersosialisasi tinggi dan tidak lagi ada kecanggungan antara suatu organisasi dengan masyarakat.
5. Dari segi proses, masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam penyaluran BPNT dapat merasakan hasil dari adanya program ini serta prosedur penyaluran yang sesuai dengan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung:Alfabeta. Pratama.
- Syaukani dkk. 2015:229. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Model Implementasi Kebijaksanaan Publik*. Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Taufik dan Isril. Lister. 2013:136. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Jakarta:Grafindo Persada.
- Kapioru. 2014:105. *Implementasi Kebijakan Memecahkan Masalah-masalah Publik atau Pemerintah*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Wahab,A,S. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Hikma. Kotze. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Bandung.
- World Bank Institute. 2004. *Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan*. Edisi terjemahan : Semarang.